

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 15 Juli 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A	Provinsi Jawa Barat		
	1	Bantuan Hingga Rp 50 Juta untuk Pesantren	Tribun Jabar/Hal. 4
B		Kota Bogor	
	2	Korupsi Dana BOS Kerugian Negara Rp 17 Miliar	Pikiran Rakyat/Hal.5

Berita : Bantuan Hingga Rp 50 Juta untuk Pesantren

Entitas / Cakupan : Provinsi Jawa Barat

Sumber / Hal : Tribun Jabar/Hal. 4

Edisi : Rabu, 15 Juli 2020

## Bantuan Hingga Rp 50 Juta untuk Pesantren

**BANDUNG, TRIBUN** - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akan terus mengawasi penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di pesantren yang sudah beroperasi di tengah pandemi.

Pemerintah pusat pun, katanya, sudah mengalokasikan dana untuk pesantren supaya bisa menerapkan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB). Dana tersebut pun sebagian digunakan untuk pelacakan menggunakan *rapid test*.

"Ada anggaran yang sekarang akan kami gunakan untuk pengetesan yaitu Rp 2,6 triliun, dana untuk AKB dari pemerintah pusat. Ada Rp 50 juta untuk pesantren tipe 1, Rp 40 juta tipe 2, dan Rp 25

juta untuk tipe 3," kata Gubernur yang akrab disapa Emil ini di DPRD Jabar, Selasa (14/7).

Ada juga, kata Emil, bantuan insentif untuk guru pesantren dan pembuatan MCK serta sanitasi. Untuk pengetesan dan membeli masker menggunakan dana Rp 25 juta sampai Rp 50 juta tersebut.

"Ini sedang berproses administrasinya. Itu hanya boleh dibelanjakan untuk persiapan pembukaan pesantren. Jadi dananya ada. Nanti ada klasifikasi, sementara dibagi tiga kategori. Jadi uang itu dipakai buat *rapid test*, beli masker, dan lain-lain," katanya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum,

mengatakan sejumlah pesantren salafiyah atau tradisional di Jabar sudah beroperasi kembali. Tapi pesantren khalafiah yang memiliki sekolah formal belum melaksanakan aktivitasnya.

"Sesuai SOP yang ada di masing-masing pesantren, ada gugus tugas yang diketuai oleh kepala pesantrennya. Kemudian juga pesantren sudah memahami keharusan protokol kesehatan Covid-19 sehingga tak masalah," katanya.

Uu mengatakan, ia belum melakukan pengetesan kepada penghuni pesantren di Jabar. Namun santri yang akan masuk pesantren sudah menjalani tes kesehatan secara mandiri. (**syarif abdussalam**)

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Korupsi Dana BOS Kerugian Negara Rp 17 Miliar
Entitas / Cakupan	: Kota Bogor
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.5
Edisi	: Rabu, 15 Juli 2020

## Korupsi Dana BOS Kerugian Negara Rp 17 Miliar

### BOGOR, (PR).-

Kejaksaan Negeri Kota Bogor mengungkap dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kota Bogor. Penyimpangan dana BOS tersebut berkaitan dengan pelaksanaan ujian kenaikan kelas, ujian tengah semester, uji coba, dan ujian kenaikan kelas pada sekolah dasar se-Kota Bogor.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Bambang Sutrisna dalam konferensi pers, Senin (13/7/2020) petang, menuturkan, kejaksaan telah melakukan penyelidikan sejak awal 2020. Pada 27 Februari 2020, menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Senin (13/7/2020), Kejari Kota Bogor menetapkan satu tersangka JRM dalam kasus tersebut. JRM merupakan kontraktor penyedia-

an dalam kegiatan ujian tengah semester tingkat sekolah dasar.

"Berdasarkan pemeriksaan 20 saksi, didukung alat bukti pada kita, kami sepakat dan meminta perhitungan kerugian negara kepada Inspektorat, Kemendikbud. Kami selaku penyidik telah cukup bukti adanya perbuatan melawan hukum," ujar Bambang.

Bambang membeberkan, total kerugian negara dari praktik penyimpangan dana BOS mencapai Rp 17.189.919.828. Kerugian dihitung dari praktik penyalahgunaan dana BOS sejak 2017 hingga 2019.

Menurut Bambang, dalam setahun, ada delapan kegiatan ujian. Modus operasinya yakni pengadaan kertas UTS, uji coba, ujian kenaikan kelas, dan ujian akhir sekolah. Seharusnya, pengadaan kertas cukup dikelola dewan sekolah dan komite sekolah. Namun, pengadaan dikelola Kelompok Kerja Kepala Sekolah.

Saat ini, tersangka JRM telah ditahan di Lapas Paledang, Kota Bogor. Tersangka juga telah mengembalikan kerugian negara

sebesar Rp 100 juta.

"Sudah ditahan, kita ikuti protokol kesehatan. Dengan cara apa? Yang bersangkutan sudah di-rapid test. Hasilnya nonreaktif, jadi kami lakukan penahanan," katanya.

Penanganan kasus tersebut, diakui Bambang, sempat jeda karena pandemi Covid-19. Setelah ada pelanggaran, langsung tancap gas mengumpulkan bukti dan menetapkan satu tersangka dalam kasus tersebut.

### Dalangnya

Bambang memastikan akan segera mencari tahu siapa dalang utama penyalahgunaan dana BOS tersebut. "Tujuannya apa? Untuk memberi pembelajaran agar dana BOS digunakan untuk rakyat miskin. Tujuannya ini sudah jelas, agar orang-orang itu bisa mengenyam pendidikan. Kita tunggu waktu saja, ini baru penetapan tersangka, nanti pembuktian kita buktikan pada proses persidangan," ujar Bambang.

Kejari Kota Bogor sebulan sebe-

lumnya telah melakukan pemeriksaan empat pejabat di kalangan Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Empat saksi tersebut yakni Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fakrudin, Kepala Bidang Sekolah Dasar Maman Suherman, serta Kepala Subperencanaan dan Pelaporan Disdik Kota Bogor Jajang Koswara dan Warni.

Kepala Disdik Kota Bogor Fakrudin saat dikonfirmasi tak banyak memberikan komentar. Fakrudin hanya mengatakan menyerahkan penanganan kasus tersebut sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

"Sementara itu, saya enggak mau kasih *statement*. Saya serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Mudah-mudahan semuanya lancar, kami percayakan yang punya kompetensi yaitu kejaksaan. Intinya itu saja dulu, kami percayakan kepada beliau untuk memproses secara hukum, ini jadi pelajaran un-